

# ULAMA DI PERSIMPANGAN JALAN (Telaah Terhadap Peran Ulama dalam Kehidupan Politik di Indonesia)

Muh. Haras Rasyid

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)

DPK. Universitas Islam Makassar (UIM).

E-mail: muhammadharas1234@gmail.com

## Abstract:

*Ulama at the crossroads, examine the role of Ulama in political life in Indonesia. Ulama the title on a personal figure who has advantages in Islam, especially religious knowledge, practice of worship and akhlaq al karimah. Ulama are actually located at a crossroads as neutral position for enlightenment protector and guidance to the people. However, the condition of politics in Indonesia, some Ulama are no longer in an ideal position that exists at a crossroads regulating flow interests of the people, but they also put themselves on political practice. Every children of Indonesian has the same rights to play role on the nation interest, especially through the realm of politics. Including Ulama as one of the nation component is not restricted to participate on contributing in the interests of the nation and state according to their expertise. It's just that their wisdom is needed to not get involved on negative things but the contrary give colour of Islam on Indonesian politic for real.*

## Abstrak:

Ulama di persimpangan jalan, telaah terhadap peran ulama dalam kehidupan politik di Indonesia. Ulama gelaran pada sosok pribadi yang memiliki kelebihan dalam Islam, khususnya ilmu agama, pengamalan ibadah dan *akhlaq al karimah*. Ulama sejatinya berada di persimpangan jalan yang memiliki posisi netral sebagai pengayom pemberi pencerahan dan petunjuk pada umat. Namun kondisi perpolitikan di Indonesia, sebahagian ulama tidak lagi berada pada posisi idealnya yang ada dipersimpangan jalan mengatur lalulintas kepentingan umat, tetapi mereka juga ikut bermain politik praktis. Siapapun anak bangsa Indonesia memiliki hak yang sama ikut berperan untuk kepentingan bangsa, khususnya melalui dunia politik. Termasuk para ulama sebagai salah satu komponen bangsa tidaklah haram untuk ikut memberikan sumbangsih pada kepentingan bangsa dan negara sesuai keahliannya. Hanya saja, diperlukan kearifan mereka agar tidak terlibat pada hal-hal yang negatif, sebaliknya betul-betul nyata memberikan warna ke Islam dalam perpolitikan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Ulama, Kehidupan Politik, Indonesia

## I. PENDAHULUAN

Allah swt adalah *wasiun alim* (maha luas ilmunya). Ilmu yang diberikan Allah swt. terhadap manusia sangat sedikit (QS al-Isra'/17: 85), sehingga ilmu yang dimiliki seluruh manusia tidak bisa dibandingkan dengan ilmu Allah swt. Meskipun demikian, Allah swt. sangat mengapresiasi bagi manusia penuntut ilmu yang sedikit itu, kemudian mereka menda-

patkan dan mengamalkannya untuk kepentingan kehidupannya dan kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Tentu saja yang diapresiasi dan bahkan diangkat derajatnya adalah yang memperoleh ilmu dan dimanfaatkannya didasarkan pada iman kepada Allah swt (QS al-Mujadalah/58: 11).

Dalam istilah keilmuan diantaranya menyebutkan bahwa orang yang diketahui memiliki banyak ilmu disebutkan

dengan istilah “ulama”. Sejalan dengan itu dalam literatur-literatur Islam, orang yang disebut sebagai ulama lebih ditujukan kepada orang yang memiliki banyak ilmu keislaman, baik penguasaannya terhadap satu bidang keilmuan maupun berbagai banyak bidang keilmuan dalam Islam.<sup>1</sup> Dengan ketinggian ilmu para ulama mereka dekat dengan masyarakat, mereka dipatuhi dan diteladani ucapan dan perbuatannya oleh orang-orang yang disekitarnya.

Ketokohan seorang ulama di mata masyarakat, menjadikan mudah meraih simpatik, sehingga apa yang ulama inginkan, baik masalah kehidupan ekonomi, kehidupan nyaman, aman maupun kehidupan politik tidak sulit memperolehnya. Realitas yang melekat pada pribadi ulama seperti ini, maka tidak dapat diingkari, apakah dengan dorongan dan kesadaran sendiri untuk memperbaiki kehidupan bangsa atau karena adanya pengaruh eksternal, sehingga banyak ulama terlibat dalam kehidupan politik di Indonesia.

Tidak berbeda dengan profesi-profesi yang lain, seperti akademisi, pengusaha dan artis, ulama juga menjadi primadona bagi pihak-pihak yang sudah karatan di dunia politik. Lewat partai politik secara formal atau ikut-ikutan mendukung, mau tidak mau ulama menjadi rebutan untuk dijadikan sebagai aikon dalam menarik dukungan atau suara pada setiap perhelatan perhelatan politik lima tahunan di Indonesia, seperti Pilkada, Pilleg dan Pilpres, bahkan pemilihan yang bersifat ilmiah dalam dunia akademik terdengar juga memerlukan dukungan ulama.

Posisi ulama yang strategis seperti ini dapat dipersepsikan sebagai “Ulama di

---

<sup>1</sup>Bidang keilmuan dalam Islam misalnya: Ilmu-ilmu yang berkaitan langsung dengan Al-Qur'an dan hadis, ilmu fiqhi dan ushul fiqhi, ilmu tasawwuf, bahasa Arab dan pembahagiannya. Terdapat banyak ulama yang menguasai dengan baik berbagai macam bidang ilmu tersebut, ada juga sangat menguasai satu bidang ilmu saja, tapi ilmu yang lain tidak terlalu menguasai dan juga disebut sebagai ulama. Saat ini disebut juga sebagai ulama, tidak terlalu menguasai berbagai macam ilmu agama, tetapi mereka sangat mampu menghubungkannya dengan aspek-aspek kehidupan duniawi.

Persimpangan Jalan”. Sebab mereka sebagai teladan dan panutan, gambaran idealnya atau sejatinya ulama berada di tengah atau netral (tidak memihak), bagaikan polisi mengatur lalu lintas di persimpangan jalan. Namun kenyataannya terkesan, apakah dipaksa oleh keinginan sendiri atau karena kondisi politik Indonesia yang menjadikan ulama tidak lagi harus berada di persimpangan jalan, tapi memilih jalan masing-masing untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Memilih kepada siapa tempat ulama berlabuh dari berbagai macam warna politik yang tersedia adalah aturan pilihan politik sehingga tampaklah kemudian para ulama berbedabeda jagoan politiknya yang memunculkan persaingan antara para ulama itu sendiri.

## II. PEMBAHASAN

### A. Konsep Dasar Ulama

Kata ulama berasal dari bahasa Arab yang telah dibakukan dalam kamus bahasa Indonesia dan secara luas digunakan dalam komunikasi sehari-hari dalam masyarakat Indonesia, baik secara formal maupun tidak formal. Dengan nassifnya pemakaian kata ulama pada masyarakat Indonesia, sehingga dalam pengucapan dan penulisannya dalam komunikasi sehari-hari tidak lagi terikat pada kaedah penulisan bahasa Arab, tetapi lebih mengikuti pada lidah dan cara penulisan Indonesia.

Selain kata ulama dimaknai dan dipersepsikan sebagai seseorang yang berilmu juga dimaknai sebagai seorang yang alim. Makna seorang alim, karena orang yang mendapatkan predikat ulama dalam konsep ajaran Islam adalah pribadi yang taat beribadah kepada Allah swt. dan sangat patuh menjalankan perintah Allah swt. dan meninggalkan larangan-larangan-Nya. Itulah sebabnya dalam masyarakat Islam, kalau terdapat seseorang yang pada umumnya dikenal sebagai seorang ulama, tetapi tingkah laku dan ucapannya tidak menggambarkan sebagai seorang alim, maka masyarakat meragukan keulamaan yang bersangkutan.

Kata ualama adalah jama' dari kata "alim",<sup>2</sup> yang terdiri dari struktur huruf "Ain, Lam dan Mim" yang berarti bekas sesuatu atau membedakan yang lain, atau sesuatu yang memperjelas, seperti bendera gunung dan tanda (alamat).<sup>3</sup> 'Alim seakar kata dengan kata "ilmu", sehingga seseorang yang tepat disebut sebagai ulama adalah orang yang memiliki ilmu. Namun dalam konteks ulama menurut konsep ajaran Islam adalah orang yang ahli dalam bidang agama Islam.<sup>4</sup> Ulama adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi tentang ayat-ayat Allah swt. baik yang bersifat *Qur'aniyah/qauliyah* maupun *kauniyyah*.<sup>5</sup> Dalam arti ulama adalah orang yang memiliki ilmu dan memhami secara jelas apa yang tertulis dan diterangkan dalam al-Qur'an dan dapat mengkaji apa yang tidak jelas atau tersirat dalam al-Qur'an tentang alam jagat raya dengan segala fenomena kehidupan yang ada di dalamnya.

Dalam al-Quran kata "ualama" yang langsung disebutkan hanya dua kali, yaitu pada: QS Asy Syu'ara'/26: 197 dan QS Fatir/35: Ayat pertama adalah hal pembicaraan tentang kandungan al-Qur'an yang telah diakui kebenarannya (diketahui oleh ulama Bani israil. Ayat kedua merupakan konteks pemberitahuan atau ajakan al-Qur'an untuk memperhatikan turunnya hujan dari langit, beraneka ragamnya buah-buahan, gunung, binatang dan manusia. Berdasarkan kedua ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa yang dimaksud ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan atau keahlian tentang ayat-ayat Allah swt., baik yang bersifat *qur'aniyah* (yang tertulis jelas

dalam al-Qur'an) maupun yang bersifat *kauniyah* (yang berkaitan dengan alam yang petunjuk umumnya terdapat dalam al-Qur'an).<sup>6</sup>

Dapat dipahami bahwa kata atau pengertian ulama yang berakar kata dari "ilmu" menimal di dalamnya dapat diambil dua pengertian. Pertama, secara khusus bermakna seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan tentang al-Qur'an dan ilmu-ilmu lain yang berdasarkan atau dikaji langsung dari al-Qur'an, misalnya ilmu hadis, tafsir, tasawwuf dan ilmu fiqhi (ahli dalam bidang ilmu agama Islam). Kedua, secara umum bermakna bahwa yang dimaksud ulama adalah "orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat atau membawa masalahat buat umat manusia".<sup>7</sup>

Kedua makna tersebut memberi petunjuk bahwa yang disebut ulama adalah seseorang yang ahli dalam ilmu pengetahuan, baik ahli ilmu agama Islam maupun ahli ilmu umum yang bersumber dan bermuara kepada kebaikan, bermanfaat untuk kemaslahatan umat manusia. Hal tersebut dapat didasarkan pada hakikat ilmu sebagai cahaya (nur) dari Allah swt. yang dipancarkan kepada hamba yang dikehendakinya sebagai perangkat agar dapat mengembang amanah sebagai khalifah di muka bumi. Olehnya itu antara satu rumpun ilmu dengan kelompok ilmu yang lain yang dimiliki oleh para ulama tidak bisa dipertentangkan, tetapi wajib dikompromikan untuk saling melengkapi antara satu dengan yang lain.

## B. Keistimewaan Ulama

Seseorang yang dianugerahi ilmu yang tinggi kemudian masyarakatnya memberi gelar ulama merupakan petunjuk bahwa yang bersangkutan adalah sosok yang memiliki maqam (tempat) yang istimewa di sisi Allah swt. dan penghargaan yang mulia di lingkungan masyarakat.

<sup>2</sup>Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz. *Al Munawwir Kamus Indonesia Arab*, (Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 924.

<sup>3</sup>Lihat Abi al-Husain Ahmad Ibnu Faris bin Zakariyah. *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby wa Syirkahu, 1972), h. 689.

<sup>4</sup>Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1239.

<sup>5</sup>Lihat Mochtar Husein. *Tanggung Jawab Sosial Ulama Perspektif Al-Qur'an*, (Cet. II; Yogyakarta: Aswaja Nusantara Press, 2017), h. 24.

<sup>6</sup>Lihat M. Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1997), h. 382.

<sup>7</sup>Lihat Uraian selengkapnya M. Quraish Shihab. *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarkat*, h. 383-384.

Sebagai dasar bahwa Allah swt. memberi keistimewaan kepada ulama (orang yang berilmu) dapat dilihat pada: QS al-Mujadalah/58: 11. Ayat ini menegaskan bahwa Allah swt. mengangkat derajat (memberi keistimewaan) bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Demikian pula masyarakat memberi kemuliaan pada ulama, karena mereka terinspirasi dengan ayat tersebut bahwa orang yang beriman kepada Allah swt. dan memiliki ilmu yang dirasakan oleh masyarakat Allah swt sangat memuliakannya, maka pantas manusia juga demikian. Penghargaan yang diberikan masyarakat, khususnya yang berlaku umum di Indonesia terhadap ulama utamanya yang ahli ilmu agama, yakni diberikan gelar khusus yang tidak diberikan pada orang lain, diantaranya adalah gelar “Kiai”.<sup>8</sup> Terdapat pula gelar lain sebagai penghargaan kepada ulama yang berlaku lokal kedaerahan, misalnya di Sulawesi Selatan dengan panggilan “Anrengguru”, Sulawesi barat dengan sebutan “Annangguru”, Nusa Tenggara Barat dengan sebutan Tuan Guru dan di Sumatera barat dengan sebutan “Buya”.

Allah swt. menegaskan dalam Al-Qur’an di antara hamba-hamba Allah swt. yang takut kepadaNya hanyalah para ulama QS. Fatir/35:28. Ulama yang dimaksud takut kepada Allah swt. seperti dalam ayat tersebut adalah ulama yang sekalipun melakukan aktifitas kehidupannya dunia, tetapi semuanya diarahkan untuk mendapatkan keridhaan Allah swt.<sup>9</sup> Demikian

---

<sup>8</sup>Sebutan Kiai (Kiyai) adalah gelar yang diberikan pada alim ulama (cerdik pandai dalam ilmu agama, seperti Kiai H. Wahid Hasyim. Lihat Depertemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 565.

<sup>9</sup>Imam Al Ghazali menyebutkan bahwa tidak semua ulama itu baik, dengan membagi dua golongan ulama, yaitu: ulama akhirat dan ulama dunia. Ulama akhirat ialah ulama *khasy’yah* (takut) kepada Allah swt dan Zuhud (ialah stasiun yang aulia dan asas dari hal-hal yang diridhai Allah swt. Zuhud di dunia adalah pusat segala kebaikan dan ketaatan, sedang cintadunia adalah pusat segala dosa). Ulama dunia di dalamnya terdapat “ulama ussu”. Antara lain yang tergolong dalam ulama ini adalah yang menggunakan ilmunya sebagai mata pencaharian dunia dan menjual ayat-ayat Allah demi

pula pengakuan Allah swt. tersebut, ulama yang takut kepada Allah swt., dan kedalaman ilmunya dipastikan akan memberi manfaat dan kemaslahatan umat disekitarnya.

Disebutkan pula dalam salah sebuah hadis Rasulullah saw. bahwa ulama adalah pewaris nabi. Sekalipun hadis ini terjadi silang pendapat tentang kesahihannya,<sup>10</sup> tetapi dapat dijadikan sebagai dasar keistimewaan para ulama yang memiliki kedudukan terhormat dalam melanjutkan misi nabi untuk menyebarkan syiar Islam, karena sesuai dengan Al-Qur’an, QS. Fatir/35: 32.

Muhammad Fahmi Abdu al-Wahhab mengemukakan bahwa diwariskannya ilmu para nabi kepada ulama, adalah keinginan Allah swt memilih hamba-hambanya untuk menjadi pewaris kerena sebagai hamba pilihan, memiliki kelebihan dan merupakan yang lebih bertaqwa kepadanyaNya di antara sekian banyak hamba-hambaNya.<sup>11</sup>

Anugerah keistimewaan yang disandang oleh para ulama, selain sebagai kemuliaan yang sangat tinggi juga merupakan amanah dari Allah swt. dan RasulNya yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Itulah sebabnya, yang dipilih untuk mendapatkan amanah seperti itu adalah sosok pribadi yang memiliki ilmu yang diwariskan oleh para nabi dan benar-benar bisa meneladani pribadi dan mengikuti sunnah para nabi, khususnya Rasulullah saw.

Para ulama diberi kedudukan yang istimewa karena mereka mewarisi tugas suci sebagai *sirajan munira* (QS, al Ahzab/33:46). Tugas para nabi khususnya Rasulullah saw. adalah sebagai pembawa caya yang menerangi. Selanjutnya tugas

---

kepentingan dunia, serta selalu mengunjungi penguasa (pemerintah). Lihat Mohtar Husain. *Tanggung Jawab Sosial Ulama Perspektif Al-Quran*, h. 69-70.

<sup>10</sup>Lihat Ali bin ‘Ali Ibn Hajar al-Asqalany, *Fathu al-Bary* (Juz. I; Bairut: Dar al Ma’rifah, t.th), h. 160.

<sup>11</sup>Lihat Muhammad Fahmi Abd. al Wahhab, *Warasat al Kitab aw Risalah al-Ulama* (Kairo: Dar al I’tisham, t.th), h.26.

tersebut diwarisi oleh para ulama, sehingga para ulama didengar pendapatnya, diamalkan ajarannya, dijalankan putusan yang ditentukan, baik untuk dan oleh penguasa maupun masyarakat umum. Para ulama membangkitkan hati manusia agar mempertahankan yang hak dan memadamkan hati yang keras. Mereka laksana bintang-bintang yang ada dilangit memberi cahaya di dalam kegelapan pada semua yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut.<sup>12</sup>

Keimanan, keilmuan dan *akhlaq al-karimah* yang dimiliki oleh para ulama menjadi tolok ukur sehingga mendapatkan kedudukan terhormat di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula kapasitas seorang ulama sehingga masyarakat dapat menilai akan mendapatkan keistimewaan di mata Allah swt. dan rasulNya adalah karena didukung oleh beberapa faktor, antara lain pengamalan ibadahnya melebihi kebanyakan orang dengan istiqamah yang sangat dapat diduga dilaksanakan dengan ikhlas, hubungan-hubungan sosialnya sangat baik dan memiliki ilmu agama yang tinggi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah umat. Bukan ulama yang berkategori *dzalim li nafsih* atau ulama seperti yang disebutkan oleh Imama Al-Gazali di atas (ulama *ussu*) yang menuruti hawa nafsu dunianya dan diombang-ambingkan oleh kepentingan penguasa yang bersifat sesaat.

### C. Paran Ulama dalam Kehidupan Politik di Indonesia.

Sejak masuknya agama Islam di Indonesia, ulama sudah memiliki peran yang sangat luar biasa. Sebahagian mereka, selain ada yang khusus berdakwah menyebarkan ajaran Islam juga ada di samping berdakwah juga berdagang dalam rangka menopang kebutuhan perjuangan dan kehidupan mereka sehari-hari. Mereka dengan ikhlas berjuang dengan cara damai, santun dan tidak menyakiti, apalagi dengan cara kekerasan terhadap masyarakat yang masih sangat awam dengan agama Islam.

<sup>12</sup> Lihat al Imam Abu Bakar al Ajiri, *Akhlaq al Ulama* (Maktabah al-Saqafiyah, t.th), 10-11.

Dengan penuh *tawadhu*, *tawazzun* dan *tasamuh*, para ulama mendekati istana penguasa bukan dengan tujuan menjilat, meminta dana dan jabatan, tapi kehadiran mereka semata-mata menyampaikan kebenaran dan keunggulan ajaran Islam.

Para ualama bukannya tidak mengerti politik, mereka sangat mengerti politik ketatangeraan dan kemasyarakatan, karena mereka sedikit banyaknya telah mendalami ilmu-ilmu *al-siyasah* (politik) dari kitab-kitab dan guru-guru mereka. Tetapi mereka lebih mendahulukan bagaimana berpolitik dakwah yang bertujuan menyebarkan syiar Islam, bukan mendahulukan politik meraih kekuasaan. Mereka berpandangan, bahwa kalau ajaran Islam (aqidah, syari'ah dan akhlak) sudah tertanam kuat pada pemegang kekuasaan (raja) dan rakyatnya, maka secara kultural cepat atau lambat dengan kesadaran dan kebesaran jiwa para raja, kekuasaan akan diberikan pada ulama untuk menyebarkan dan menegakkan agama Islam secara leluasa dalam masyarakat.

Sejarah telah membuktikan, mulai awal masuknya Islam di nusantara Indonesia dan berproses sampai di alam kemerdekaan para ulama sangat nyata peran dan baktinya dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Para ulama memberikan, selain mengajarkan ilmu-ilmu agama juga memberikan keteladanan yang bersahaja, sehingga para ulama, meskipun mendapatkan tantangan, tetapi tidak ada tantangan yang sangat berarti untuk menjadikan mereka surut apalagi berhenti mendakwakan ajaran Islam. Dengan kepridian ulama seperti itu, menjadikan masyarakat dapat menerima ajaran yang mereka bawa dan menjadi teladan dalam masyarakat.

Masyarakat Indonesia yang sebelumnya tidak berkeyakinan aqidah Islam, tidak mengamalkan syariat Islam dan tidak berakhlak Rasulullah saw., para ulama menampilkan dirinya di tengah-tengah mereka tidak seperti penguasa yang bersifat memaksa, bukan sebagai pengusaha (pedagang) yang hanya mencari keuntungan dan jauh dari seperti orang berilmu

yang sombong. Sebaliknya para ulama beradaptasi dengan masyarakat dengan cara, *tawassut* (sederhana), *tawazzun* (adil), *tasamuh* (toleran) dan *tawadhu'* (rendah hati). Dengan cara seperti itu, para ulama dengan mudah mendekati masyarakat Indonesia, tidak sulit diterima oleh penguasa (*sulthan*) dan dengan cepat syariat Islam tersebar di seluruh nusantara Indonesia.

Pada era kemerdekaan, para ulama semakin eksis dan memiliki peran yang luas,<sup>13</sup> karena bukan mereka hanya berperan menyebarkan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat secara umum, tetapi sebahagian ulama diberikan kedudukan terhormat di lingkungan politik dan pemerintahan. Peran ulama terbagi dua pola, yaitu dakwah Islam tetap berjalan pada masyarakat umum yang dilakukan oleh sebahagian ulama, juga para ulama yang lain memiliki kesempatan menyebarkan dan mewarnai kehidupan politik dan kebangsaan dengan warna keislaman melalui lembaga-lembaga resmi negara.

Peran ulama dalam kehidupan politik Indonesia sangat besar dan nyata. Salah satu diantara peran tersebut adalah lahirnya "Piagam Jakarta"<sup>14</sup>, selanjutnya dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum pernyataan bahwa "negara berdasarkan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" adalah momentum yang menguntungkan bagi umat Islam Indonesia. Lewat para ulama, berhasil mencanangkan dasar keislaman dalam konstitusi negara yang

kemudian menjadi landasan filosofis dan yuridis yang tertera dalam sejarah kehidupan politik dan perkembangan hukum Islam di Indonesia.

Pada masa orde baru umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia menjadi perhitungan postif bagi pemerintahan Soeharto. Rezim Soeharto sadar bahwa salah satu kekuatan politik di Indonesia selain kuatan politik seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dapat menopang kekuasaannya adalah kekuatan umat Islam. Olehnya itu pemerintahan ini banyak merangkul ulama dan tokoh Islam ke dalam suatu sistem pemerintahan yang kemudian disebut pemerintahan orde baru dengan ujung tombak kekuatan politik Golkar (Golongan Karya)

Pada era orde baru inilah mulai sangat terasa dan nampak para ulama memasuki era baru kehidupan politik praktis. Pada sisi lain juga, para ulama mulai terbelah sebagai cikal bakal terjadinya "ulama di pesimpangan jalan". Sebahagian ulama tertarik pada rayuan politik pemerintahan orde baru, bagaikan "dayun bersambut". Pemerintahan menarik para ulama ke dalam dunia politik khususnya politik di bawa kendali Golkar dengan alasan, bahwa ulama diperlukan pemikirannya dan perannya dalam pengelolaan negara karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Pada sisi lain, para ulama juga menyambutnya dengan dalih, bahwa tidak mungkin dapat merubah dan mengarahkan suatu sistem pemerintahan kepada hal yang posisif kalau kita (ulama) tidak terlibat di dalamnya.

Pada era ini pada awalnya terdapat beberapa partai berasaskan Islam yang banyak anggotanya dari para ulama dan tokoh-tokoh Islam, tetapi setelah terjadinya fusi atau penggabungan partai Islam, maka sebahagian ulama tetap eksis di partai Islam dan sebahagian yang lain "lompat pagar" ke Golkar. Para ulama masuk ke dalam Golkar yang tidak berasaskan Islam, bukan tanpa alasan. Paling tidak dengan alasan bahwa untuk masuk ke dalam sistem pemerintahan khususnya di lembaga legeslatif, maka

<sup>13</sup>Diantara ulama yang berperan adalah K.H. Hasim Asy'ari, K.H. Ahmad Dahlan, K.H. Wahid Hasyim, H. Oemar Said Cokroaminoto, K.H. Syaifuddin Zuhri dan lain-lain.

<sup>14</sup>Piagam Jakarta adalah naskah yang disusun oleh para pemimpin Indonesia di jaman pendudukan Jepang (1942-1945), sebagai pencerminan hasrat bangsa Indonesia untuk merdeka. Piagam Jakarta atau Jakarta Chaster, isi dan bunyinya hampir sepenuhnya tercermin kembali dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lihat Tim Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1984), h. 2705.

peluang atau jalan yang lapang dan aman adalah lewat Golkar. Sebab kekuatan politik ini adalah kekuatan yang mayoritas dan kuat mengakar di tengah-tengah masyarakat, sehingga disebutkan sebagai 'single majority', sedangkan kekuatan politik yang lain seperti hanya mengharapkan sisa-sisa saja.

Bibit dari terjadinya "ulama di persimpangan jalan" dalam kehidupan politik di Indonesia yang tampak di era orde baru tersebut, berlanjut dan semakin berkembang pada era pemerintahan selanjutnya yang disebut pada era reformasi. Pada era sesudah tumbanganya kekuatan orde baru yang terkesan oteriter dan berkuasa selama 32 tahun, semangat eforia muncul menyala-nyala. Dengan alasan demokrasi yang terbelenggu selama 32 tahun, maka era reformasi mulai dari elit politik, kekuatan kelompok yang ada dalam masyarakat, para ulama sampai pada rakyat kecil bebas bersuara menyalurkan pendapatnya dan bebas menentukan aspirasi politiknya, tidak lagi dihantui kekuatan politik yang dominan dan terkadang menghalalkan semua cara.

Khusus para ulama pada orde ini sangat merdeka dalam menentukan arah politiknya, bahkan kalau diperhatikan, baik yang benar sebagai ulama, yang mendadak jadi ulama maupun simpatisan ulama seperti menguasai panggung politik Indonesia. Berbagai macam simbol yang muncul sebagai wujud dari kekuatan politiknya, seperti istilah "majlis zikir, pengawal fatwa ulama, alumni 212 dan ijtima' ulama" dan banyak lagi yang muncul dari simpatisan-simpatisan para ulama.

Merdeka menentukan dalam menentukan pilihan politik merupakan amanat konstitusi, tetapi merdeka atau bebas dalam bertindak dan mengeluarkan pendapat tidaklah bisa ditolerir kalau melanggar hukum dan hak-hak orang lain. Berdemokrasi bukan berarti tanpa batas dan nilai yang harus diperhatikan bagi yang mengagungkan dan mempraktikkan demokrasi. Bagi ulama dalam berdemokrasi, tentu paham agama dan etika serta mengerti demokrasi

dan politik memiliki peran ganda. Pertama, sekalipun mereka berada di persimpangan jalan, tapi diperlukan kearifan dalam memposisikan dirinya untuk mengatur lalulintas ke mana umat harus berjalan di dalam gonjang-ganjing politiknya. Kedua, para ulama sendiri, selain sebagai pengatur mereka juga diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kancah politik praktis. Namun mereka juga tetap terikat pada predikat keulamaanya sebagai *warasatu al-anbiya* dan *sirajan munira*, yaitu menjaga dan menunjukkan keteladanan para nabi dalam dan membawa pelita dalam menjalankan misi *amar ma'ruf* dan *nahimungkar* dalam mempragakan ide politiknya.

Tidak dapat diingkari dalam dunia politik Indonesia saat ini sangat kental mengedepankan kepentingan politik kelompok yang dibungkus dengan kepentingan politik kebangsaan. Masing-masing pihak khususnya yang berlaga dalam perpolitikan di Indonesia, sangat ingin kelompoknya berkuasa agar paling tidak bisa eksis di eksekutif dan legislatif. Untuk mewujudkan keinginannya itu, mereka menggandeng kekuatan-kekuatan lain yang ada di masyarakat, salah satunya adalah kekuatan ulama, apakah dengan kesepakatan sebagai pendukung biasa, pendukung utama dan pendukung yang mendapatkan kue kekuasaan. Pendukung biasa adalah sekedar simpatisan yang ada di akar rumput. Pendukung utama adalah pendukung garda terdepan yang kemudian kalau partai politik itu berhasil berkuasa, maka para ulama sangat bisa mempengaruhi kebijakannya. Pendukung yang terakhir, selain bisa mempengaruhi kebijakan penguasa juga masuk sebagai eksekutor kebijakan, dan boleh jadi mereka sangat dominan.

Kondisi dukung mendukun di atas membawa sebahagian para ulama sulit menempatkan dirinya menjadi wasit yang obyektif dan adil, sulit menjadi menunjuk jalan yang lurus dan susah menghindari perilaku-prilaku negatif dari akibat derasnya kepentingan politik. Nafsu duniawi yang menghinggapinya sebahagian ulama yang terlibat dalam pergolakan politik, yang

tadinya berada dipersimpangan jalan mengatur umat dengan kharisma dan kewibawaan dari pancaran iman, ilmu dan keteladannya, mau tidak mau juga ikut-ikutan mendapatkan label baru yang akrab berdengung di dunia politik yakni “tidak mengenal siapa kawan-siapa lawan, kepentingan kelompok di atas segalanya, halal dan haram sama saja”.

Ulama yang berada di persimpangan jalan pergolakan politik di Indonesia, di antara bekal dan prisai yang paling baik untuk dimiliki adalah “ikhlas dan istiqamah”. Ikhlas mengatur hiruk pikuk kepentingan politik tanpa terpengaruh pada rayuan-rayuan yang dapat menjerumuskan dirinya ke dalam lubang perpecahan antar umat. Istiqamah menjaga pridikatnya sebagai sosok pribadi yang memiliki kedudukan dan keistimewaan yang diberikan oleh Allah swt. dan masyarakatnya. Ulama bukan berarti haram masuk ke dalam dunia politik, tetapi prinsip-prinsip keislaman yang sakral dan suci adalah hal yang perlu diperhatikan dan dipertahankan dengan baik, agar apapun peran ulama dapat menjadi warna yang bercahaya dalam dunia politik Indonesia. Tetapi, jika ulama tidak dapat menempatkan dirinya sebagai ulama dengan berbagai gelar keistimewaan yang di sandangnya, maka ulama akan “ditabrak oleh kendaraan kepentingan yang maha dahsyat”. Pada akhirnya bukan tidak mungkin mereka jatuh ke tempat yang rendah, selanjutnya tidak lagi didengar dan diikuti nasihatnya, tidak lagi diteladani kepribadiannya serta tidak lagi dipercaya keulamaannya. *Naudzu billah.*

### III. PENUTUP

1. Ulama adalah sosok pribadi yang terhormat, karena ulama dalam pengertian umum adalah orang yang memiliki ilmu yang tinggi dibandingkan dengan kebanyakan orang. Dalam makna khusus, ulama dalam ajaran Islam adalah seorang yang memiliki keimanan tinggi yang dapat dilihat dari ilmu agamanya yang dalam, pengamalan ibadahnya dan akhlaknya yang sangat baik dan lain-lain kebaikan yang ada pada dirinya. Sebagai

manusia biasa bukan berarti tidak memiliki kesalahan, tetapi dapat dinilai bahwa kehidupan ulama adalah wujud manusia yang selalu menghindari dosa, sehingga masyarakatnya memberikan berbagai macam gelar yang menunjukkan sebagai sosok pribadi yang baik. Ulama yang memiliki kepribadian yang sangat baik, diberikan keistimewaan diantaranya sebagai *warasatul anbiya'* yang membawa *sirajan munira*.

2. Ulama dan politik adalah dua hal yang berbeda maknanya, tetapi dapat memiliki relevansi dalam aktifitas kehidupan. Ulama sebagai sebutan bagi orang yang berilmu, tentu dibutuhkan perannya sesuai yang disediakan dalam dunia politik. Sebab ulama dalam makna khusus akan membawa suara moral, untuk meluruskan yang bengkok, mempertahankan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kebaikan dalam dunia politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara.
3. Ulama di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan dunia politik di Indonesia. Sebab masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan pada sisi lain model politik di Indonesia menganut asas terbuka. Untuk itu, semua komponen bangsa berhak dan berkewajiban memperhatikan kepentingan bangsa. Ulama yang idealnya berada dipersimpangan jalan untuk mengatur lalu lintas kepentingan umat Islam, misalnya memberikan pelajaran agama di madrasah dan pesantren, berdakwah di mesjid-mesjid, melakukan penyuluhan di masyarakat menulis buku-buku agama. Namun kenyataannya, dengan kondisi politik keindonesiaan yang terbuka, cenderung memanas pada saat perhelatan politik tiba dan sarat dengan kepentingan kelompok, para ulama sebahagian tidak lagi berada dipersimpangan jalan sebagai pengatur dan penunjuk jalan yang bijak atau setidaknya menjadi penonton yang baik, tetapi ikut juga berperan menjadi pemain politik, menjadi supporter, baik sebagai supporter panatik maupun ikut-ikutan mendukung para pemain politik.

## DAFTAR PUSTAKA

*al-Qur'an al-Karim*

al-Ajiri, al-Imam Abu Bakar. *Akhlak Ulama*, Makkah: Maktabah al-Saqafiyah, t.th.

al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathu al-Bary*, Juz. I; Bairut: Dar al-Ma'rifah, t.th.

Bin Zakariyah. Abi Husain Ahmad Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Mesir: Musafa al-Baby al-Halaby wa Syirkahu, 1972.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Husain, Mokhtar. *Tanggung Jawab Sosial Ulama Perspektif al-Qur'an*, Cet.II,

Yogyakarta: Aswaja Nusantara Press, 2017.

Munawwir, Ahmad Warson dan Muhammad Fairuz. *Al-Munawwir Kamus Indonesia Arab*, Cet. I; Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. XIV; Bandung: Mizan, 1997.

Tim Redaksi Ensiklopedi Indonesi. *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: IkhtiarBaru Van-Hoeve, 1984.

al-Wahhab, Muhammad Fahmi Abd. *Waratsat al-Kitab aw Risalah al-Ulama*, Kairo: Dar al-I'tisham, t.th.